

ABSTRAK

Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui merupakan permasalahan paling banyak muncul di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di kabupaten tegal, menemukan dan menganalisa bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di kabupaten tegal dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di kabupaten tegal.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dan bersifat Deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan datanya didapat secara langsung dari Narasumber dengan instrumen Penelitiannya menggunakan data baik tertulis maupun langsung melalui wawancara dan diskusi.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di Kabupaten Tegal adalah Penyelesaian sengketa pengembalian batas terhadap tetangga batas objek atas aduan dari pihak bersengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dapat diselesaikan dengan cara mediasi dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator dan prosedur yang disepakati, mediasi ini disebutkan di dalam ketentuan umum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau sering disebut Perkaban Nomor 11 Tahun 2016, dimana dalam penyelesaiannya mediator memfasilitasi untuk dapat tercapainya suatu solusi kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak. selain itu peran badan pertanahan nasional (bpn) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di Kabupaten Tegal pasal 39 ayat (1) huruf c mediatornya berasal dari BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap objek yang diukur pengembalian batas terhadap tetangga batas objek di Kabupaten Tegal ketidakhadiran salah satu pihak yang berkepentingan baik dari pihak pelapor, terlapor, saksi dan petinggi desa yang membuat terhambatnya jalannya mediasi dan terjadinya mediasi deadlock atau belum tercapainya kesepakatan. Selain hambatan tersebut terdapat solusi yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yaitu ganti rugi terhadap tanah yang *overlapping* atau menaruh patok di tengah-tengah tanah 1 meter yang *overlapping*. Pihak kantor pertanahan kabupaten tegal sebaiknya lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan informasi bahwa kantor pertanahan dapat menjadi mediator ketika terjadi sengketa.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Pengembalian Batas, Mediasi*

ABSTRACT

Boundary disputes, namely differences of opinion, the value of interest regarding the location, boundaries and size of the recognized land area are the most common problems in the Tegal District Land Office. Therefore, this study aims to analyze the implementation of dispute resolution against objects that measured the return of limits to neighboring object boundaries in the district of Tegal, find and analyze how the role of the National Land Agency (BPN) in the implementation of dispute resolution against the measured object returns to the neighboring limit objects in the district of Tegal and analyze the obstacles and solutions in the implementation of the settlement of disputes against objects which measured the return of limits to neighboring object boundaries in Tegal regency.

The method used in this research is the Sociological Juridical Approach Method and is qualitative descriptive, where the data collection is obtained directly from the resource person with his research instrument using both written and direct data through interviews and discussions.

The results found in the study of the settlement of disputes against objects that measured the return limit to neighboring object boundaries in Tegal Regency is the settlement of disputes returning the boundaries to neighboring object boundaries on complaints from disputing parties to the Tegal Regency Land Office can be resolved by mediation with the help of third parties namely mediator and agreed procedure, this mediation is mentioned in the general provisions of the Head Regulation of the National Land Agency or often referred to as Perkaban Number 11 of 2016, wherein the settlement mediator facilitates the achievement of a solution that mutually benefits the parties. besides the role of the national land agency (cpn) in carrying out the settlement of disputes against objects that measured the return of limits to neighboring object boundaries in Tegal Regency article 39 paragraph (1) law c the mediator comes from the Central BPN, Regional Office BPN and / or Land Office in settlement dispute through mediation. Obstacles and solutions in the implementation of dispute resolution against objects that measured the return of limits to neighboring object boundaries in Tegal Regency the absence of one of the interested parties both from the reporting party, reported party, witnesses and village officials who made the mediation hampered and mediated deadlock or agreement . In addition to these obstacles there is a solution given by the Tegal District Land Office, namely compensation for overlapping land or placing a pole in the middle of a 1 meter overlapping land. The Tegal district land office should intensify socialization to the community to provide information that the land office can be a mediator when a dispute occurs.

Keywords: Dispute Settlement, Limit Returns, Mediation